

RENCANA KERJA TIM REFORMASI BIROKRASI
Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung
TAHUN 2021

AREA PERUBAHAN	PERMASALAHAN	RENCANA KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN (BULAN)												PERMASA LAHAN	PENDANAAN	TIM POKJA
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
Manajemen Perubahan	Tim Reformasi Birokrasi Unit Kerja Belum Tersusun	Penyusunan SK Tim Reformasi Birokrasi Diskop, UKM dan Perdagangan														Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Bag Perencanaan
	Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Belum Tersusun	Penyusunan Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi														Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Bag Perencanaan dan Bidang Teknis
	Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Belum Dilaksanakan	Monitoring dan Evaluasi Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan														Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Bag Perencanaan
	Tindak Lanjut Atas Hasil Monitoring dan Evaluasi Belum dilakukan	Koordinasi Tindak Lanjut Atas Hasil Monitoring dan Evaluasi														Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Bag Perencanaan
	Seluruh PNS Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan belum memahami Isi Renja Reformasi Birokrasi	Sosialisasi dan koordinasi internal Renja Reformasi Birokrasi terkait														Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Sub Bag Perencanaan
	Rencana Aksi Tindak Lanjut Belum Dilaksanakan	Koordinasi Pelaksanaan Rencana Aksi dan Tindak Lanjut PMPRB														Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Bag Perencanaan
	Agen Perubahan belum optimal	Pembentukan tim Agen Perubahan (Ketua, Sekretaris dan 3 anggota)														Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Sub Bag Perencanaan
	Terdapat Peraturan Perundang-Undangan Yang Tidak Harmonis	Identifikasi Peraturan Perundang-Undangan Yang Tidak Harmonis														Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Kelenmbagaan dan Pengawasan
Penataan dan Penguatan Organisasi	Terdapat Unit Kerja dengan tugas dan fungsi yang tumpang tindih dengan unit kerja lain didalam OPD	Revisi Peraturan Perundang-Undangan Yang Tidak Harmonis														Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Bidang Kelenmbagaan dan Pengawasan
		Identifikasi Uraian Tugas dalam Perbup 35 Tahun 2016														Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Bidang Pemberdayaan Dan Pengembangan koperasi, UKM
Penataan Tata Laksana	Belum dilakukan evaluasi atas peta proses bisnis yang sedang berjalan	Penyusunan Peta Proses Bisnis														Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Bidang Perdagangan
		Evaluasi Peta Proses Bisnis														Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Bidang Perdagangan
	Peta Proses Bisnis Belum dijabarkan kedalam SOP	Penyusunan SOP yang diperlukan														Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Bidang Perdagangan

	Belum dilakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap PPID	Monitoring dan Evaluasi PPID																	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Bidang Perdagangan
Peneraan Sistem Manajemen SDM	Rencana Redistribusi Pegawai Belum tersusun	Penyusunan Rencana Redistribusi Pegawai																	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Sub Bag Kepegawaian
	Belum ada Proyeksi Kebutuhan PNS selama 5 tahun	Penyusunan Proyeksi Kebutuhan PNS selama 5 tahun																	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Sub Bag Kepegawaian
	Penilaian Kinerja Individu hanya sampai pada eselon IV	Penyusunan Perjanjian Kinerja sampai level staff																	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Kepegawaian
		Penilaian Kinerja Individu s/d level staff																	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Kepegawaian
		Cetak Laporan Kinerja Individu Setiap Bulan																	Kegiatan Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Bagian Kepegawaian
	Pengarahan Disiplin Pegawai Belum dilakukan secara berkala	Monitoring dan Evaluasi Disiplin Pegawai Melalui Capaian Disiplin Aparatur Setiap Bulan																	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Sub Bag Kepegawaian
	Informasi Faktor Jabatan Belum Disusun	Penyusunan Informasi Faktor Jabatan																	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Sub Bag Kepegawaian
	Informasi pada SIMPEG belum update	Update Data di SIMPEG Berkala																	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Sub Bag Kepegawaian
	Perencanaan Kinerja Belum Optimal	Penyusunan Matrik Kinerja																	Penatausahaan Keuangan SKPD	Sub Bagian Keuangan
	Pelaporan Kinerja Belum Optimal	Pelaporan Kinerja Online																	Penatausahaan Keuangan SKPD	Sub Bagian Keuangan
Penguatan Akuntabilitas	Penaanganan Gratifikasi Belum Optimal	Sosialisai Penaanganan Gratifikasi																	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Seksi Pengembangan Penguatan Dan Perlindungan Usaha
		Monitoring Pelaksanaan Anti Gratifikasi																	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Seksi Pengembangan Penguatan Dan Perlindungan Usaha
		Evaluasi atas pelaksanaan Anti Gratifikasi																	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Seksi Pengembangan Penguatan Dan Perlindungan Usaha
		Pelaporan LHKASN																	Kegiatan Pelayanan Administrasi Kepegawaian SKPD	Seksi Pengembangan Penguatan Dan Perlindungan Usaha
Penguatan Penguasaan	Sistem Pengendalian Intern Belum Optimal	Pembangunan lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah																	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Seksi Pengembangan Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro

		Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern															Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Seksi Pengembangan Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro
		Penilaian Risiko Organisasi															Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Seksi Pengembangan Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro
		Pengendalian Atas Risiko Organisasi															Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Seksi Pengembangan Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro
		Monitoring atas Pengendalian Risiko															Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produk dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Seksi Pengembangan Penguatan Dan Perlindungan Usaha Mikro
Peringkat Kualitas Pelayanan Publik	Penanganan Pengaduan Layanan Belum Optimal	Penyusunan Prosedur Pengaduan															Perberdayaan Kembangkan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
		Penyediaan Media Pengaduan															Perberdayaan Kembangkan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
		Penunjukan Petugas/tim Pengelola Pengaduan															Perberdayaan Kembangkan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
		Evaluasi Atas Penanganan Pengaduan															Perberdayaan Kembangkan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
		Sosialisasi Whistle Blowing System															Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
		Penanganan Benturan Kepentingan Belum Optimal															Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
		Monitoring Penanganan Benturan Kepentingan															Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
		Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan															Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
		Penyusunan Standar Pelayanan															Pemberdayaan Kembangkan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro
		Kurangnya Kualitas Pelayanan Yang Diberikan															Pemberdayaan Kembangkan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

